PENGARUH KEADILAN DAN SISTEM PEPRPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN (*TAX EVASION*)
(Survey Pada bagian Pengawasan Pada Kantor Pelayanan Pajak Majalaya Kota Bandung)

Oleh :
Danu Andito
Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

Awareness in Indonesia of the tax is still not reached the level as expected. Most people still cynical and less trusting of the existence of the tax because they are considered burdensome. In addition, people experiencing difficulties because of ignorance of the tax system in terms of payment, both compute and report the tax. This study aims to determine how much influence the level of tax justice against tax evasion (Tax Evasion) and how much influence the taxation system on the level of tax evasion (Tax Evasion).

The method used in this research is descriptive and verification method with quantitative approach. Sampling method in this study using saturated sample. The unit of analysis in this study is the Tax Office Pratama Bandung Majalaya and observation units in this research that the tax authorities in the supervision of the Tax Office Pratama Bandung Majalaya. Verification analysis in this study using a statistical test is to test a structural equation-based variance or better known as Partial Least Square (PLS) use software Smart PLS 2.0.

The results of this study showed that the rate of tax fairness influence effect on tax evasion (Tax Evasion) as well as the tax system affect the tax evasion (Tax Evasion)

Keywords: Justice taxation, Tax System, Tax Evasion

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena penggelapan pajak yang terjadi di PT. MPA dan PT. NKC terkait penggelapan pajak diantaranya tidak menyampaikan SPT PPh tahunan wajib pajak badan , SPT masa PPN dan juga melakukan pemungutan PPN tetapi tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut. Selain itu pelanggran yang terjadi di PT.NKC karena tidak menyampaikan SPT masa PPN dan menyampaikan SPT masa PPN yang isinya tidak benar (Adjat Jatmika, 2015).

Adapun fenomena Sistem Perpajakan Menurut Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany menyebut, dari 28.000.000 pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baru 10.000.000 orang yang menyerahkan laporan SPT. Saat ini orang pribadi yang sudah membayar pajak sebanyak 23.000.000 orang dari potensi 60.000.000 orang. Total hampir 38.000.000 orang yang belum membayarkan pajak. Banyak Wajib Pajak yang sudah bayar pajak dipotong langsung dari kantor, tapi tidak dilaporkan 22.000.000 orang. Sementara untuk badan usaha, Fuad menyebut, ada sebanyak 20.000.000 lebih di Indonesia. Sebanyak 5.000.000 badan usaha seharusnya sudah membayar pajak, namun realisasi pembayaran maupun pelaporan pajak baru 550.000 badan usaha. Ini adalah ketidakadilan di bidang perpajakan, karena mereka yang pendapatannya sudah di atas PTKP tapi tidak menyetorkan pajaknya tetapi tetap mendapatkan fasilitas yang di berikan oleh Negara. Dan juga termasuk ke dalam tindakan *Tax Evasion.* (Fuad Rahmany,2014)

Fenomena terkait keadilan pajak adalah meskipun sistem perpajakan sudah diterapkan akan tetapi pengaduan di sektor perpajakan masih tinggi, dari 196 pengaduan yang diterima sejak 2014 hingga 2015, sebanyak 51 pengaduan tersebut adalah tentang pemeriksaan pajak, ini terjadi karena wajib pajak merasa tidak adil atas pelayanan dari petugas pajak. Sebab, meski wajib pajak sudah memenangkan atas kasus perpajakannya di pengadilan seperti restitusi, kurang bayar maupun kelebihan dalam bayar pajak, namun petugas pajak tetap tidak mengabulkan pengajuan keberatan wajib pajak karena alasan takut disebut bekerjasama dan dituduh melakukan penggelapan pajak dengan wajib pajak tersebut (Daeng M Nazier, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh keadilan Dan Sistem Peprpajakan Terhadap Penggelapan (*Tax Evasion*).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Keadilan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).
2. Seberapa besar Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion).*

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*).
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax Evasion*).

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Keadilan Pajak

Definisi pajak menurut Suminarsasi (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara".

Definisi keadilan menurut Wiratni Ahmadi **(**2010:10**)** menyatakan bahwa keadilan pajak adalah suatu pola pemungutan pajak yang diselenggarakan secara umum dan merata agar dapat terpenuhi asas keadilan dan seluruh individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum pajak.

2.1.2 Sistem Perpajakan

Definisi sistem perpajakan Siti Kurnia Rahayu (2010:75) suatu kesatuan yang terdiri dari unsur *Tax Policy*, *Tax* Law, dan *Tax Administration*, yang saling berhubungan satu sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal.

2.1.3 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion)*

Siahaan (2010:110) mengatakan bahwa penggelapan pajak adalah usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Keadilan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion)*

Yossi Friskianti dan Bestari Handayani (2014) menyatakan bahwa penting nya keadilan bagi wajib pajak dalam melaksanakan pemungutan dan pembayaran pajak akan menimbulkan pengaruh terhadap sikap wajib pajak dalam melaksanakan dan melakukan pembayaran kewajiban pajak mereka . Wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat keadilan maka tindakan *Tax Evasion* rendah, namun sebaliknya apabila tingkat keadilan rendah maka tindakan *Tax Evasion* semakin tinggi.

2.2.2 Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion)*

Dengan memanfaatkan kemajuan sistem yang ada, diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Cara pelaporan dan pembayaran pajak yang dahulu susah dan rumit menyebabkan wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal tersebut menyebabkan banyak wajib pajak yang berusaha menghindari pajak bahkan menggelapkan pajak (Yossi Friskianti, 2014).

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_1: Keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion).*

H_2: Sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion).*

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 2) Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Adapun metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dan metode verifikatif.

Umi Narimawati (2010: 29) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Sugiyono (2012:13) menjelaskan bahwa metode verifikatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sumadi (2011:29) pengertian operasionalisasi variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Konsep dapat diamati atau observasi ini penting, karena hal yang dapat diamati itu membuka kemungkinan bagi orang lain selain peneliti untuk melakukan hal yang serupa, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain.

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka variabel-variabel yang akan diteliti perlu diberi batasan-batasan sebagai berikut:

1. Variabel Independen/Bebas

Pengertian variabel independen menurut (Sugiyono, 2012:64) menyatakan bahwa :

“Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent, dalam bahasa Indonesia sering disebut juga variabel bebas, variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.

Yang menjadi variabel indenpenden atau variabel bebas pada penelitian ini adalah keadilan pajak (X_1), dan sistem perpajakan (X_2).

2. Variabel Dependen/Terikat

Pengertian variabel dependen menurut (Sugiyono, 2012:64) menyatakan bahwa:

“Seiring disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen, dalam bahasa Indonesia seiring disebut sebagai variabel terikat, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Definisi data primer menurut (Sugiyono, 2012:137) pengertian data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Responden dari penelitian ini adalah Fiskus yang di KPP Pratama Bandung.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:224) teknik pengumpulan data adalah Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

3.4 Populasi, Sampel, dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1. Populasi

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2011:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pengertian diatas populasi merupakan obyek dan subyek yang berada disuatu wilayah tertentu. Populasi dari penelitian ini adalah semua fiskus yang terdapat di KPP Pratama Majalaya Bandung yang berjumlah 30 orang.

3.4.2. Sampel

Pengertian sampel menurut (Sugiyono, 2012:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Responden dalam penelitian ini adalah fiskus pada KPP Majalaya Bandung. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 fiskus, maka teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penarikan sampling jenuh.

Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2011:68). Hal ini sering digunakan untuk penelitian dengan jumlah sampel dibawah 30 orang, atau untuk penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan tingkat kesalahan yang sedikit atau kecil.

Responden dalam penelitian ini adalah fiskus pada KPP Majalaya. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 fiskus pada bagian pengawasan.

3.4.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Majalaya Bandung. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan kuisioner. Kuisioner yang telah disusun diuji secara kuantitatif melalui uji validitas dan uji reabilitas.

3.6 Metode Analisis Data

Pengertian metode analisis menurut (Umi Narimawati, dkk. 2010:41) Metode analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang telah diproses dari hasil observasi lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh keadilan dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Selanjutnya data yang telah terkumpul kemudian dikodekan *(coding)* serta diolah menggunakan analisis deskriptif dan verivikatif untuk mengetahui tanggapan responden terhadap setiap variabel yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) menggunakan *Partial Least Square* (PLS).

4.1.1 Pengujian Alat Ukur Penelitian

4.1.1.1 Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas untuk 19 pernyataan yang mewakili variabel kualitas pelayanan pajak, sistem administrasi perpajakan modern dan kepuasan wajib pajak memiliki nilai yang lebih besar dari titik kritis yang telah ditentukan (0,3) sehingga seluruh pernyataan dinyatakan valid.

4.1.1.2 Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas yang diperoleh adalah ketiga nilai koefisien reliabilitas tersebut sama-sama lebih besar dari 0,7 dan termasuk pada kriteria *good* sehingga alat ukur yang digunakan dinyatakan reliabel.

4.1.2 Analisis Deskriptif

4.1.2.1 Analisis Deskriptif Keadilan (X_1)

Secara keseluruhan nilai persentase skor yang diperoleh mengenai keadilan pajak pada **Tabel 4.10** adalah sebesar 65,33% dan termasuk dalam kategori cukup baik yang berada pada interval 55%-75%, hasil tersebut menunjukkan bahwa keadilan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya sudah cukup baik.

4.1.2.2 Analisis Deskriptif Sistem Perpajakan (X_2)

Secara keseluruhan nilai persentase skor yang diperoleh mengenai sistem perpajakan pada **Tabel 4.15** adalah sebesar 64,48% dan termasuk dalam kategori cukup baik yang berada pada interval 55%-75%, hasil tersebut menunjukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya tergolong cukup baik.

4.1.2.3 Analisis Deskriptif Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Y)

Secara keseluruhan nilai persentase skor yang diperoleh mengenai penggelapan pajak pada **Tabel 4.23** adalah sebesar 67,67% dan termasuk dalam kategori cukup baik yang berada pada interval 55%-75%, hasil tersebut menunjukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya tergolong cukup baik.

4.1.3 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah diduga adanya pengaruh dari keadilan pajak terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Pada penelitian ini terdapat 3 variabel laten dan 19 variabel manifest yakni variabel Keadilan Pajak (X_1) terdiri dari 4 varibel manifest, variabel Sistem Perpajaka (X_2) terdiri dari 7 variabel manifest, dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) (Y) Terdiri dari 8 variabel manifest. Adapun hasil perhitungan dari keseluruhan model menggunakan *SmartPLS 2.0* dapat dilihat pada **Gambar 4.4**

4.1.3.1 Pengujian Kecocokan Model Pengukuran

1. Model Pengukuran Variabel Keadilan Pajak

Dilihat variabel Keadilan Pajak (X_1) terdiri dari 4 variabel manifes yang memiliki hubungan positif terhadap Keadilan Pajak (X_1) dan nilai *loading factor* untuk setiap variabel manifes lebih besar dari *Rule of Thumb* (0,7) sehingga dapat disimpulkan

bahwa penggunaan ketiga variabel manifes tersebut dinyatakan mampu mengukur Keadilan Pajak X_1) secara tepat.

2. **Model Pengukuran Variabel Sistem Perpajakan**
   Dilihat variabel Sistem Perpajakan (X_2) terdiri dari 7 variabel manifes yang memiliki hubungan positif terhadap Sistem Perpajakan (X_2) dan nilai *loading factor* untuk setiap variabel manifes lebih besar dari *Rule of Thumb* (0,7) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan ketiga variabel manifes tersebut dinyatakan mampu mengukur Sistem Perpajakan (X_2) secara tepat.
3. **Model Pengukuran Variabel Penggelapan Pajak (*Tax Evasion)***
   Dilihat variabel Penggelapan Pajak (*Tax Evasion)* (Y) terdiri dari 8 variabel manifes yang memiliki hubungan positif terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion)* (Y) dan nilai *loading factor* untuk setiap variabel manifes lebih besar dari *Rule of Thumb* (0,7) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan ketiga variabel manifes tersebut dinyatakan mampu Penggelapan Pajak (*Tax Evasion)* (Y) secara tepat.

4.1.3.2 Pengujian Kecocokan Model Struktural

Pengujian model struktural *(inner model)* dapat dilihat dari nilai *R-Square* untuk setiap variabel *endogen* sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai *R-Square* dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten *eksogen* tertentu terhadap variabel laten *endogen*.

4.1.3.3 Uji Kecocokan Model (*Goodness of Fit (GoF)*)

Nilai GoF diperoleh sebesar 0,608 tergolong substansial atau tinggi karena lebih dari 0,36, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji kecocokan model *goodness of fit* sudah tergolong tinggi.

4.1.4 Pengujian Hipotesis

4.1.4.1 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Nilai $t_{statistik}$ yang telah disajikan pada tabel 4.41, $t_{statistik}$ untuk variabel X_1 diperoleh sebesar -4,870. Nilai ini lebih kecil dari -1,960 dengan $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_1, artinya keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dengan kontribusi sebesar 31,57%, yang menunjukan bahwa hipotesis penelitian diterima.

4.1.4.2 Pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*)

nilai $t_{statistik}$ yang telah disajikan pada tabel 4.42, $t_{statistik}$ untuk variabel X_2 diperoleh sebesar -4,870. Nilai ini lebih kecil dari -1,960 dengan $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_1, artinya sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dengan kontribusi sebesar 20,54%, yang menunjukan bahwa hipotesis penelitian diterima.

4.1.5 Pembahasan

4.2.1 Pegaruh Keadilan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar -4,870 lebih besar dari t_{kritis} -1,960 yang menunjukan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh keadilan berpenaruh terhdap penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya. Hal ini dapat terlihat dari koefisien jalur struktural keadilan terhadap penggelapan pajak sebesar -0,452. Menunjukan bahwa ketika keadilan menurun, maka penggelapan pajak akan meningkat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya, begitupun sebaliknya. Kemudian dari analisis deskriftif membuktikan bahwa keadilan mempunyai tanggapan responden sebesar 65,33% dan termasuk kategori cukup baik yang artinya keadilan yang dilakukan fiskus sudah cukup baik.

Hasil dari penellitian ini diketahui bahwa keadilan memberikan pengaruh sebesar 31,57% terhadap penggelapan pajak. Sedangkan sisanya sebesar 68,43% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, faktor lain yang

mempengaruhi nya diantaranya: tarif pajak, ketepatan pengalokasian, dan teknologi dan informasi.

Fenomena terkait keadilan pajak adalah meskipun sistem perpajakan sudah diterapkan akan tetapi pengaduan di sektor perpajakan masih tinggi, dari 196 pengaduan yang diterima sejak 2014 hingga 2015, sebanyak 51 pengaduan tersebut adalah tentang pemeriksaan pajak, ini terjadi karena wajib pajak merasa tidak adil atas pelayanan dari petugas pajak. Sebab, meski wajib pajak sudah memenangkan atas kasus perpajakannya di pengadilan seperti restitusi, kurang bayar maupun kelebihan dalam bayar pajak, namun petugas pajak tetap tidak mengabulkan pengajuan keberatan wajib pajak karena alasan takut disebut bekerjasama dan dituduh melakukan penggelapan pajak dengan wajib pajak tersebut (Daeng M Nazier, 2016)

Hasil penelitian ini didukung dengan teori mengenai keadilan juga mempunyai dampak terhadap penggelpan pajak. Prinsip keadilan pajak menurut yang pertama didasarkan pada keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat, prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah, jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip yang kedua mengacu pada prinsip keadilan dalam membayar, menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya (Siahaan, 2010:76)

Kemudian juga didukung oleh penelitian sebelumnya dari Yossi Friskianti dan Bestari Handayani (2014), Tri Mei Sarah (2014), Siti Marlina (2012). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak

4.2.2 Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar -2,826 lebih besar dari t_{kritis} -1,960 yang menunjukan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa sistem perpajakan berpenaruh terhdap penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya. Hal ini dapat terlihat dari koefisien jalur struktural keadilan terhadap penggelapan pajak sebesar -0,306. Menunjukan bahwa ketika sstem perpajakan menurun, maka penggelapan pajak akan meningkat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya, begitupun sebaliknya. Kemudian dari analisis deskriftif membuktikan bahwa keadilan mempunyai tanggapan responden sebesar 64,48% dan termasuk kategori cukup baik yang artinya keadilan yang dilakukan fiskus sudah cukup baik.

Hasil dari penellitian ini diketahui bahwa keadilan memberikan pengaruh sebesar 20,54% terhadap penggelapan pajak. Sedangkan sisanya sebesar 79,46% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Fenomena khusus yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Majalaya salah satunya adalah masih banyaknya wajib pajak yang tidak melek teknologi ,salah satunya menggunakan *e-billing* untuk pembayaran pajak dan *e-filling* untuk pembayaran SPT tahunan untuk PNS,TNI,POLRI banyak di antaranya yang tidak paham teknologi. Jadi karena ketidaktahuan dan cara menggunaka *e-billing* dan *e-filling* banyak wajib pajak yang akhirnya tidak membayarkan pajaknya dan tidak menyampaikan SPT tahunan. Sistem-sistem yang berlaku sekarang ini tidak sepenuhnya menjangkau lapisan masyarakatat terutama yang berada di pedesaan karena keterbatasan jaringan internet dan kurang paham nya akan sistem e-biliing dan *e-filling* . Oleh sebab itu wajib pajak mengira dengan cara membayar pajak yang susah banyak diantaranya yang menghindari membayar pajak

Hasil penelitian ini didukung dengan teori mengenai sistem perpajakan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan memadainya teknologi yang ada. Dengan adanya sistem perpajakan yang baik akan mengurangi wajib pajak dalam melakukan tindakan *Tax Evasion* menurut (Pandiangan, 2007:34).

Kemudian juga didukung oleh penelitian sebelumnya dari Raden Devri Ardian, Dudi Pratomo (2013), Jessica Lupita Tanaja (2015), Irma Suryani Rahman (2013), Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil fenomena pada latar belakang penelitian, rumusan masalah, hipotesis dan hasil penelitian mengenai keadilan pajak dan sitem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) pada KPP Pratama Bandung Majalaya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Bandung Majalaya. Terkait masalah yang terjadi di dalam keadilan pajak, disebabkan karena:
   a) Kurangnya sosialisasi tentang perpajakan kepada wajib pajak
   b) Masih kurangnya kesadaran waib pajak dalam membayar pajak
   c) Ketidak adilan dalam melayani wajib pajak.
2) Sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Bandung Majalaya. Terkait masalah sistem perpajakan, disebabkan karena:
   a) Masih kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai sistem perpajakan.
   b) Kurang efektifnya sistem perpajakan yang diterapkan
   c) Sanksi pajak belum dilaksanakan dengan tegas,hal ini tercermin dari masih adanya wajib pajak yang berusaha menyuap fiskus.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh keadilan dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) pada KPP Pratama Bandung Majalaya, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keadilan pajak maka disarankan dengan dilakukannya pembinaan kepada wajib pajak dan diadakan sosialisasi mengenai perpajakan, penjelasan tentang fungsi pajak, sistem pajak dan yang lainnya, dengan dilakukannya pendekatan dan penjelasan kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan paham bahwa pajak adalah sumber pendapatan terbesar Negara untuk membiayai Negara dan mensejahterakan masyarakatnya, sehingga masalah tingkat keadilan pajak dan sistem perpajakan akan teratasi. Dan pemerintah juga harus bisa berlaku adil dalam melayani wajib pajak.
2. Untuk meningkatkan sistem perpajakan, maka disarankan pemerintah terlebih dahulu melakukan sosialisasi mengenai sistem perpajakan yang ada agar wajib pajak tidak merasa bingung dan kesulitan pada saat membayar pajak karena sistem perpajakan yang rumit, memberikan fasilitas yang memadai dan mudah dimengerti, dengan diberikanya kemudahan dalam membayar pajak melalui sistem yang memadai dan juga dengan pelayanan terbaik yang diberikan kepada wajib pajak, maka diharapkan dalam membayar pajak melalui sistem perpajakan bisa berjalan dengan baik dan bisa menghilangkan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan alasan tidak mengerti dengan sistem yang ada atau pun merasa tidak adil dengan pelayanan yang diberikan.

5.2.2 Saran Akademis

1. Saran Pengembangan Ilmu
   Untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi perpajakan di bidang perpajakan, diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain agar penelitian-penelitian selanjutnya menambah keberagaman hasil penelitian dan melahirkan pengetahuan yang baru.
2. Bagi peneliti lain

Bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan jika melakukan penelitian yang sama dengan variabel yang sama menggunakan referensi buku terbaru agar lebih *update*.

DAFTAR PUSTAKA

A, Erwan, dan Dyah Ratih. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial. Yogyakarta: Gava Media.

Adjat Jatmika, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.2015. Kanwil DJP Jawa Barat I Serahkan Dua Wajib Pajak ke Kejati Jabar.

Ahmadi, Wiratni, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak,* Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006.

Alleyne, M., Horne, M.K., Miller, J.L. 2008. Individualized treatment for irondeficiency anemia in adults. *Am J Med*. Nov;121(11):943-8.

Andi Supangat.2008. Statistik dalam Kajian Deskriptif, Infensi dan Paramatik.

Anshari Ritonga 2010, *Benahi Peraturan Dan Lembaga Perpajakan* /komwas-pajak benahi-peraturan-dan-lembaga-perpajakan.

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.

Ayu, Dyah dan Rini Hastuti. 2009. "*Persepsi WP: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion WP Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi")".* Kajian akuntansi.

Ayu, S. D. dan R. Hastuti. 2008. " Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Tax Evasion: Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mempunyai Kegiatan Usaha". Semarang: UNIKA Soegijapranata.

Barker,Chris.,Pistrang,Nancy.,& Elliot,Robert. (2002). *Reasearch Methods In Clinical Psychology* (2th ed*)* . Jhon Wiley & Sons.

Daeng M Nazier. Ketua Komite Pengawas Perpajakan (KPP). 2016: "*Layanan Masih Buruk, Banyak Wajib Pajak Yang Tertindas*". http://harianterbit.com/m/ekonomi/read/2016/02/24/57400/0/21/Layanan-Masih-Buruk-Banyak-Wajib-Pajak-Tertindas

Dantes, Nyoman. 2012. Metode Penelitian. Yogyakarta: ANDI.

Duwi Priyatno, 2010. Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran. Gaya Media, Yogyakarta.
Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Elffers, Henk. 1991. *Income Tax Evasion.* Eramus University Rotterdam.

Ghozali, Imam (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima) Semarang : Universitas Diponegoro.

Istijanto, 2009. Aplikasi Praktis Riset Pemasaran, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Haula, Rosdiana., Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Raja Grafindo Jakarta : Kencana Prenada.

Irma Suryani Rahman.2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).Jurnal. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Jessica Lupita Tanaja. 2015.Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi

terhadap Penggelapan Pajak. Jurnal. Surabaya : Universitas Katolik Widya Mandala

Jogiyanto.2005. Analisis dan desain sistem informasi.Yogyakarta:Penerbit Andi.
Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta :Graha Ilmu.

Liberti Pandiangan. 2007. *Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.

Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
M. Zain. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009.* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. " *Pengaruh Tax Avoidence Terhadap Cost of Debt*". PPJK 20, Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
Persada, Jakarta, 2005.
Masyhuri, M. Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Raden Devi Ardian dan Dudi Pratomo. 2014. "Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Oleh Wajib Pajak Badan". Jurnal. Bandung : Telkom

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep & Aspek*
Rahman, I. S. 2013. " Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)". Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Rineka Cipta, Jakarta

Siahaan, Marihot P. 2010. "Hukum Pajak Material". Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.

Siti Marlina. 2012. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Dan Ketepatan Pengalokasian Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Jurnal. Riau: Universitas Maritim Raja Ali Haji

Soemitro, Rochmat. 1992. "*Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994".* Bandung, Eresco.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Suharyadi dan Purwanto S.K. (2009). *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern.* Jakarta: Salemba Empat.

Suryabrata, Sumadi, 2006. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. "*Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*." Yogyakarta, PPJK 15 Universitas Gajah Mada.

Supriyati. (2011). *Belajar Akuntansi Dasar.* Bandung*:* LABKAT PRESS UNIKOM

Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013

Tri Mei Sarah.2014.Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Jurnal. Semarang : Universitas Islam Sultan Agung.

Ulber Silalahi.(2012).*Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Umi Narimawati. 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Penerbit Genesis.

Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas, 2003. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.

Yakub. 2012. Pengantar Sistem Informasi, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yossi Friskianti dan Handayani, Bestari Dwi. 2014. Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakn, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan *Tax Evasion*. Jurnal. Semarang : UNS.

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 4.10

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Keadilan

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	(%)	Kriteria
1	Pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh	96	150	64,00%	Cukup Baik
2	Pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban pajak	98	150	65,33%	Cukup Baik
3	Mengenakan pajak secara umum dan merata	100	150	66,67%	Cukup Baik
4	Memberikan hak bagi si wajib pajakmengajukan keberatan pembayaran	98	150	65,33%	Cukup Baik
Total		392	600	65,33%	Cukup Baik

Tabel 4.15

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Sistem Perpajakan

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	(%)	Kriteria
1	Memberikan hak bagi si wajib pajak untuk mengajukan keberatan pembayaran	97	150	64,67%	Cukup Baik
2	Memadainya sistem yang berkaitan dengan perpajakan	98	150	65,33%	Cukup Baik
3	Akses sistem yang mudah	96	150	64,00%	Cukup Baik
4	Pemanfaatan fasilitas sistem perpajakan	95	150	63,33%	Cukup Baik
5	Jelas dan dapat dimengerti	93	150	62,00%	Cukup Baik
6	Bekerja lebih cepat	100	150	66,67%	Cukup Baik
7	Membuat pekerjaan lebih mudah	98	150	65,33%	Cukup Baik
Total		677	1050	64,48%	Cukup Baik

Tabel 4.23

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	(%)	Kriteria
1	Membuat pekerjaan lebih mudah	99	150	66,00%	Cukup Baik
2	Pelayanan fiskus yang mengecewakan	100	150	66,67%	Cukup Baik
3	Tingginya tarif pajak	101	150	67,33%	Cukup Baik
4	Sistem administrasi perpajakan yang buruk	105	150	70,00%	Tinggi
5	Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)	110	150	73,33%	Tinggi
6	Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar	101	150	67,33%	Cukup Baik
7	Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong	109	150	72,67%	Tinggi
8	Berusaha untuk menyuap fiskus	87	150	58,00%	Cukup Baik
Total		812	1200	67,67%	Cukup Baik

Tabel 4.32

***Loading Factor* Indikator Variabel Keadilan Perpajakan**

X1	Variabel Manifes	Loading Factor	t-hitung	Keterangan
$X_{1.1}$	Pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh	0.789854	10,406	Valid
$X_{1.2}$	Pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban pajak	0.901414	52,237	Valid
$X_{1.3}$	Mengenakan pajak secara umum dan merata	0.872686	29,081	Valid
$X_{1.4}$	Memberikan hak bagi si wajib pajakmengajukan keberatan pembayaran	0.746720	19,150	Valid

Tabel 4.33

Loading Factor Indikator Variabel Sistem Perpajakan

X2	Variabel Manifes	Loading Factor	t-hitung	Keterangan
$X_{2.1}$	Memberikan hak bagi si wajib pajak untuk mengajukan keberatan pembayaran	0.768668	13,480	Valid
$X_{2.2}$	Memadainya sistem yang berkaitan dengan perpajakan	0.831644	25,829	Valid
$X_{2.3}$	Akses sistem yang mudah	0.823089	17,457	Valid
$X_{2.4}$	Pemanfaatan fasilitas sistem perpajakan	0.828492	21,166	Valid
$X_{2.5}$	Jelas dan dapat dimengerti	0.872229	41,088	Valid
$X_{2.6}$	Bekerja lebih cepat	0.816220	15,176	Valid
$X_{2.7}$	Membuat pekerjaan lebih mudah	0.831423	29,917	Valid

Tabel 4.34

Loading Factor Indikator Variabel Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Y	Variabel Manifes	Loading Factor	t-hitung	Keterangan
$Y_{1.1}$	Membuat pekerjaan lebih mudah	0.809520	21,667	Valid
$Y_{1.2}$	Pelayanan fiskus yang mengecewakan	0.829938	31,701	Valid
$Y_{1.3}$	Tingginya tarif pajak	0.855735	36,340	Valid
$Y_{1.4}$	Sistem administrasi perpajakan yang buruk	0.836890	41,845	Valid
$Y_{1.5}$	Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)	0.847662	31,254	Valid
$Y_{1.6}$	Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar	0.884801	40,405	Valid
$Y_{1.7}$	Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong	0.843368	27,491	Valid
$Y_{1.8}$	Berusaha untuk menyuap fiskus	0.822864	12,905	Valid

Tabel 4.37

Hasil Uji Perbadingan Akar AVE dengan Korelasi Variabel Laten

VARIABEL LATEN	AKAR AVE
X_1	0,830
X_2	0,825
Y	0,842

	KORELASI ANTAR VAR LATEN		
	X_1	X_2	Y
X_1	1		
X_2	0,807	1	
Y	-0,699	-0,671	1

Tabel 4.38

Hasil Uji *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*

Variabel Laten	Composite Reliability	Cronbach Alpha
X_1	0,898	0,851
X_2	0,937	0,922
Y	0,951	0,941

Tabel 4.39

Hasil Nilai *Goodness of Fit* (GoF)

	Communality	R Square
Variabel Y	0,708321	0,521044
Perkalian	0,369	
Nilai GoF	0,608	

Tabel 4.40

Nilai Koefisien Jalur Struktural dan Uji Signifikansi Hipotesis

	Original Sample (O)	T Statistics (|O/STERR|)
X_1 -> Y	-0,452	-4,870
X_2 -> Y	-0,306	-2,826

Tabel 4.41

Analisis Koefisien Determinasi

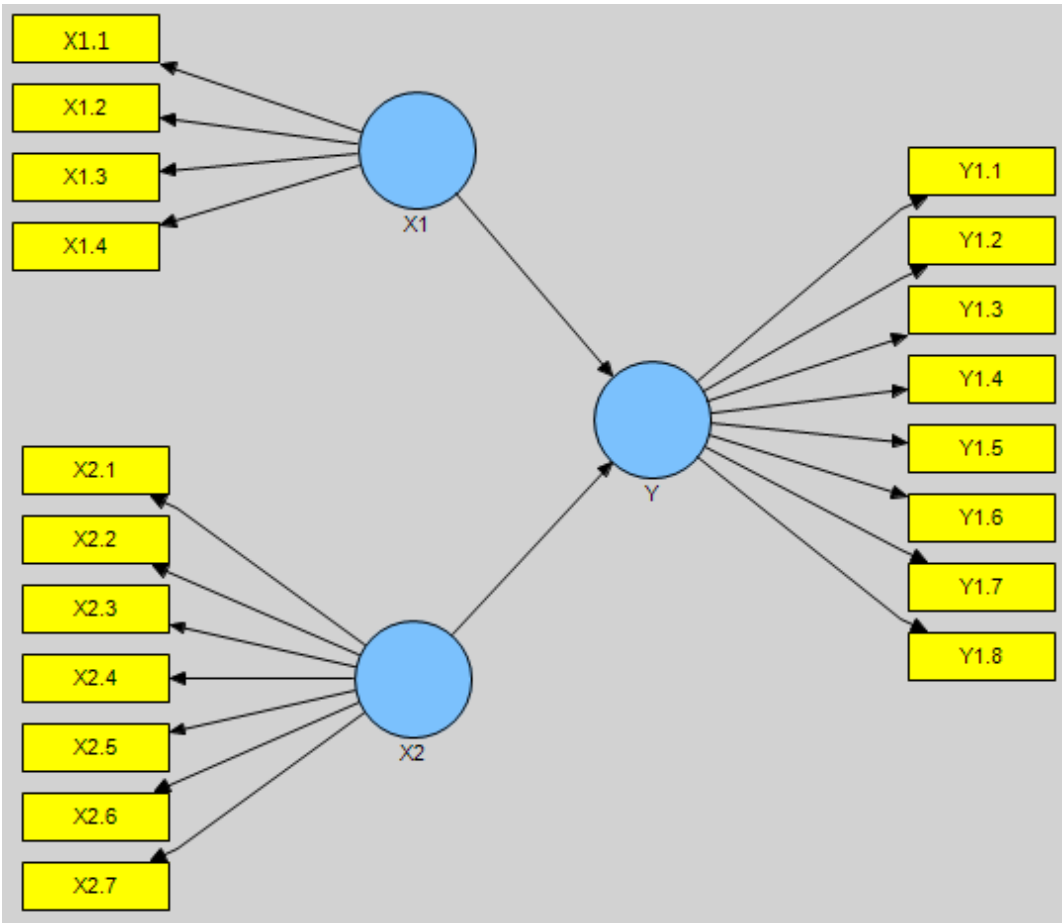
	Koefisien Jalur Struktural	Korelasi dengan Y	Pengaruh (%)
X_1 -> Y	-0,452	-0,699	31,57%
X_2 -> Y	-0,306	-0,671	20,54%
TOTAL PENGARUH (R^2)			52,10%

Tabel 4.42

Parsial Variabel X_1 terhadap Y

Latent Variable	Koefisien Jalur	T_{hitung}	t_{kritis}	Keterangan	Kesimpulan
X_1 -> Y	-0,452	-4,870	-1,960	H_0 ditolak	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan *software* PLS



Gambar 4.4

Struktur Analisis Variabel Penelitian secara Keseluruhan